


ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya
Volume 10, Nomor 1, Februari 2021: 53 - 63
 [10.33772/etnoreflika.v10i1.908](https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v10i1.908)

ISSN: 2252-9144 (Cetak)
ISSN: 2355-360X (Online)

TRADISI NGELEGI MARGA DALAM MASYARAKAT KARO: PROBLEMA IDENTITAS INTEGRASI ATAU MULTIKULTUR

THE TRADITION OF NGELEGI MARGA IN KARO SOCIETY: THE PROBLEM OF INTEGRATED OR MULTICULTURAL IDENTITY

Raharja Sembiring¹, Rut Debora Butar butar²

^{1,2}Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Jakarta, Jl. Proklamasi No. 27,
Jakarta Pusat, Indonesia
Email korespondensi: raharjamilala@yahoo.com

Diterima: 11 Juli 2020; Direvisi: 16 Februari 2021; Disetujui: 24 Februari 2021

Copyright © 2021 The Authors



This is an open access article
under the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) License

How to cite (APA): Sembiring, R., & Butar butar, R. D. (2021). Tradisi ngelegi marga dalam masyarakat Karo: problema identitas integrasi atau multikultur. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, 10(1), 53–63. <https://doi.org/DOI.10.33772/etnoreflika.v10i1.908>

ABSTRACT

Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan *tradisi ngelegi marga* dalam masyarakat Karo. Tujuannya adalah untuk menjawab persoalan identitas antara integrasi atau multikultur akibat dari tradisi tersebut. Tradisi *ngelegi marga* atau *beru* (menjemput marga) merupakan solusi kultural masyarakat Karo untuk menjawab realitas interaksi dan perluasan masyarakat Karo yang semakin kompleks. Tradisi ini sering memunculkan sebuah dilema identitas antara integrasi atau multikultur? Riset yang digunakan dalam tulisan ini adalah etnografi dan studi fenomenologi, data-data didapatkan melalui observasi partisipan, wawancara dan studi pustaka. Tradisi *ngelegi marga* atau *beru* merupakan upaya dalam merangkul semua orang menjadi subjek dalam komunitas, sehingga tidak ada subjek lyan. Tradisi *ngelegi marga* atau *beru* bukan mengabaikan identitas awal namun cara hidup dan berelasi dalam komunitas Karo.

Kata kunci: integrasi, Karo, multikultur, *ngelegi marga* atau *beru*.

ABSTRACT

This article aims to describe and to explain the tradition of ngelegi marga in Karo society. It is intended to answer the problem of integrated or multicultural identity due to this tradition. The tradition of ngelegi marga or beru (picking up clans) is a cultural solution for the Karo people to respond to the increasingly complex interactions and expansion of Karo community. This tradition often generates a dilemma between Integration and multiculturalism. The research used in this paper is ethnographic and phenomenological studies, data was obtained through participatory observation, interview and literature study. The tradition of ngelegi marga or trying to embrace all people becomes the subject in the community, so that there is no other subject. The tradition of ngelegi marga or beru does not ignore initial identities but the way of living and establishing relationship within the Karo community.

Keywords: integration, Karo, multicultural, *ngelegi marga* or *beru*.

PENDAHULUAN

Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mampu bertanya. Ia mempertanyakan dirinya, lingkungannya, eksistensinya, dan dunianya. Kemampuan untuk mengajukan pertanyaan dan cara mendapatkan pengetahuan mengitari seluruh eksistensi manusia. Armada Riyanto (2018) dalam bukunya *Relasionalitas, filsafat interpretasi: Aku, teks, liyan, fenomen* menegaskan bahwa manusia merupakan makhluk rasional. Namun, kerasionalan manusia bukanlah satu-satunya hakekatnya sebagai makhluk hidup, tetapi juga makhluk yang “relasional” (Riyanto, 2018: i). Relasionalitas manusia merupakan kodrat (*natura*) selain rasionalitasnya. Dengan sifat relasionalitasnya, manusia harus berhubungan dengan sesama serta dunianya (Sihotang, 2009:48).

Relasionalitas manusia menempatkan dirinya dalam sebuah interpretasi tentang eksistensinya di antara “aku” atau subjek, “teks” (*the text*), “fenomen” (*the reality*), dan liyan (*other*) (Riyanto, 2018: i). Relasionalitas ini juga membuat manusia selalu merefleksikan dirinya dalam budayanya. Kultur adalah bagian dari manusia menunjukkan relasionalitasnya. Bagaimana ia memandang dirinya serta eksistensinya, selalu bergerak dalam kultur yang kadang tidak homogen. Realitas manusia dan budayanya tidak berwajah tunggal, namun selalu berwajah multikultur. Relasionalitas manusia dalam wajah multikultur tidak jarang menjadi dilema dan titik seteru ketika bersentuhan dalam komunitas yang homogen. Pertanyaan, apakah tetap memperjuangkan ide multikultur atau menggabungkan diri (berintegrasi) menjadi sebuah pertanyaan yang dilematis. Permasalahan adalah “identitas.” Apakah menjemput sebuah identitas baru atau mempertahankan identitas yang lama. Apakah mempersoalkan ide integrasi atau multikultur.

Tulisan ini secara khusus akan membahas problema “identitas” dalam budaya Karo dalam perjumpaannya dengan budaya-budaya lain. Interaksi orang Karo dengan etnis lain sejak semula telah melahirkan sebuah kearifan lokal yang dikenal dengan tradisi *ngelegi merga* atau *beru*. *Ngelegi merga* dan *beru* merupakan peristiwa pengabsahan seseorang dari etnis lain selain Karo untuk diterima secara sah menjadi orang Karo. *Ngelegi merga* dan *beru* adalah jalan bagi orang yang semula dianggap asing atau *liyan* karena perbedaan etnis menjadi bagian komunitas.

Topik tentang *merga* dan *beru* (marga: klan), sebenarnya sudah cukup mendapatkan perhatian dari para peneliti hari ini dalam masyarakat Karo. Para antropolog Karo mulai melihat, sistem kekerabatan yang tertanam dalam relasi *merga* dan *beru*, tidak hanya sekadar pendanda identitas di belakang nama individu Karo. Namun, *merga* dan *beru* adalah lokus yang sangat strategis untuk melihat bagaimana orang Karo melihat dirinya maupun orang lain.

Pertampilan Brahmana misalnya, melihat *daliken sitelu* yaitu relasi yang juga diikat oleh *merga* dan *beru* dapat menjadi tawaran solusi bagi krisis sosial di Tana Karo. Brahmana mendorong pembaca (masyarakat Karo) untuk melirik kembali kearifan nenek moyang pada masa lalu dalam menangani beragam konflik (Brahmana, 2003:1-103). Hal ini ia ungkapkan agar filosofi hidup yang tertanam dalam kultur Karo dapat bertahan dalam perkembangan peradaban yang semakin maju.

Penulis yang lain adalah Fransiska Simajuntak. Simajuntak secara khusus meneliti tradisi *rebu-rebu* dalam masyarakat Karo. *Rebu-rebu* merupakan sebuah tradisi yang jika ditelisik lebih jauh juga dipengaruhi oleh relasi yang ditentukan oleh *merga* dan *beru*. *Rebu* adalah penanda relasi yang tidak bisa

diabaikan. *Rebu* adalah sebuah hikmat lokal untuk menghargai relasi perkawinan (Simanjuntak, 2017: 28). Dengan demikian tradisi *ngelegi merga* dan *beru* belum pernah diteliti secara mendalam, sehingga masih menarik untuk diteliti lebih jauh.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah sebuah pendekatan penelitian yang berupaya untuk memahami fenomena atau subjek penelitian, perilaku, motivasi dan tindakan yang melatarbelakanginya (Moleong, 2007: 17). Dalam hal ini, subjek penelitian adalah tradisi *ngelegi merga* dan *beru* dalam masyarakat Karo. Pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah ini adalah pendekatan etnografi. Pendekatan etnografi merupakan pendekatan yang digunakan untuk meneliti perilaku-perilaku sosial dalam masyarakat budaya. Pendekatan etnografi berusaha mendeskripsikan kebudayaan masyarakat tertentu. Pendekatan ini digunakan karena etnografi sendiri berbasis pada fenomenologi. Data-data dikumpulkan melalui metode pengamatan (observation), wawancara (interview) dengan beberapa budayawan Karo, baik yang ada di Jakarta maupun di Tana Karo. Selain itu, untuk menambah referensi tradisi *ngelegi merga* dan *beru*, penulis juga akan mengumpulkan dan meneliti literatur-literatur yang terkait dengan *merga*, *beru* dan *ngelegi merga dan beru*.

Analisis tentang dilemma integrasi atau multikultur akan menggunakan pemikiran Romo Frans Magni Suseno dari sudut filsafat kebudayaan. Perilaku manusia dalam dilemma identitas integrasi atau multikultur perlu ditelusuri dari kelebihan dan kekurangan kedua identitas tersebut, sehingga tidak jatuh pada salah satu klaim, integrasi atau multikultur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manusia Budaya dan Perubahan Kebudayaan

Manusia melimpah dengan kesadaran, dan manusia menyadari dirinya sebagai “aku.” Kesadaran “aku” merupakan asal usul dari pengetahuan manusia. Konsep “aku” adalah konsep subjektivitas. Konsep subjektivitas ini identik dengan kedalaman, keterlibatan, dan eksistensi (Riyanto, 2018: 189). Kesadaran manusia tentang konsep “aku” bukan sekedar kesadaran tentang nama, asal-usul keluarga atau tempat “aku” dilahirkan, namun kesadaran “aku” merupakan kesadaran akan “esse”-ku (*being*-ku), realitas meng-ada-ku. Kesadaran “aku” adalah kesadaran tentang keseluruhan, eksistensi dan keberadaanku (Riyanto, 2018: 189). “Aku” adalah keseluruhan, keutuhan manusia. Dengan demikian kesadaran “aku” menyangkut juga “aku” dan budaya-ku. Sebab “aku” meng-ada lewat sebuah budaya atau kultur.

Kebudayaan adalah ruang gerak manusia dalam bereksistensi memahami dirinya dan dunia di luar dirinya (Nataatmadja, 1984: 5). Cornelis Anthonie van Peursen, dalam Jannes Alexander Uhi, yang berjudul *Filsafat Kebudayaan: Konstruksi pemikiran Cornelis Anthonie van Peursen dan catatan reflektifnya* menjelaskan bahwa, hakikat kebudayaan adalah manusia dan alam. Peursen menjelaskan, bahwa manusia sadar akan diri bersama dengan orang lain dan semua fenomena konkret yang manusia sadari, menghubungkan dirinya dengan yang lain yaitu alam dan semesta. Hal ini menjelaskan bahwa, dalam masyarakat ada kesadaran, tidak ada “aku” yang murni. Semua kesadaran diri adalah kesadaran bersama dengan yang lain, kesadaran yang terhubung dengan orang lain (Uhi, 2017: 41-42).

Budaya merupakan seluruh eksistensi manusia yang melampaui batas-ba-

tasnya, termasuk juga melampaui segala krisis yang dia hadapi. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya tidaklah statis, namun dinamis. Budaya merupakan jawaban manusia dalam merespon setiap krisis dan tantangan kehidupannya. Manusia terdorong untuk terus menerus berinovasi untuk membuat kebudayaan menjadi semakin dinamis (Tilaar, 1999: 59-61). Peursen menyebutkan kebudayaan itu ibarat sebuah cerita yang belum tamat, yang akan terus bersambung (Peursen, 1976: 6).

Manusia terus memberi penilaian terhadap kebudayaan. Setiap hari, manusia menilai kebudayaan di sekitarnya dengan mengajukan pertanyaan: bagaimana nanti hasilnya, bagaimana perkembangan seterusnya? Benarkah arah yang sedang kita (aku) tempuh sekarang ini atau sebaliknya? Gejala-gejala kebudayaan modern manakah yang dapat dibenarkan, dan manakah yang perlu ditolak. Pertanyaan inilah yang merupakan wujud evaluasi yang merangsang perubahan kebudayaan dan peradaban manusia (Peursen, 1976: 14). Perkembangan sejarah semata-mata tidak pernah diterima begitu saja, melainkan selalu melalui sebuah proses penilaian yang dinamakan evaluasi. Evaluasi inilah yang mendorong lahirnya budaya baru atau juga perubahan wujud budaya.

Perkembangan kebudayaan harus selalu dievaluasi. Ini berarti, manusia selalu mempersoalkan sekaligus mempertanyakan berlaku tidaknya kebudayaannya. Ia kemudian sadar, seringkali ada sesuatu yang tidak beres dan dengan demikian mungkin, lewat jatuh dan bangun kembali, ia dapat maju (Peursen, 1976: 14). Dalam kebudayaan, manusia tidak hanya bertanya bagaimana sifat-sifat sesuatu, melainkan bagaimana sesuatu seharusnya bersifat. Dengan demikian gejala kebudayaan selalu berlangsung dalam suatu ketegangan. Ketegangan ini terjadi di antara lingkaran fakta-

fakta yang mengurung manusia dalam keniscayaan alam di satu pihak dan keterbukaan yang dicapai oleh penilaian yang kritis (evaluasi) di lain pihak, dinamakan ketegangan antara “imanensi” (serba terkurung) dan “transendensi.” Hidup manusia terus berada di tengah-tengah arus proses-proses kehidupan, tetapi selalu juga muncul dari arus alamnya sendiri dan mengubahnya (Peursen, 1976: 17).

Tradisi *ngelegi merga* dan *beru* menurut N. J Sembiring seorang budayawan Karo di Jakarta merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Hasil wawancara dengan Sembiring, *ngelegi merga* dan *beru* atau dapat dikategorikan sebagai bagian dari evaluasi masyarakat Karo terhadap berlakunya warisan kebudayaan mereka (Sembiring, 2019). Tradisi *ngelegi merga* dan *beru* muncul karena adanya interaksi masyarakat Karo dengan kebudayaan atau kelompok lain. Tradisi *gelegi merga* dan *beru* muncul sebagai hasil peradaban komunitas Karo yang semakin heterogen. Penyebaran populasi suku Karo dan interaksinya yang semakin beragam, dan harus mengakui adanya suku lain di luar dirinya. *Ngelegi merga* atau *beru* merupakan perubahan kebudayaan dan cara masyarakat Karo dalam mempertahankan identitasnya sekaligus cara mereka berelasi dalam realitas keragaman kultur.

Jika ditelisik dari filsafat kebudayaan, maka setiap perubahan kebudayaan disebut dengan difusi. Difusi kebudayaan merupakan proses penyebaran kebudayaan dari satu individu ke individu lain dan dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain (Kusumohamidjojo, 2017: 190). Difusi terjadi karena adanya komunikasi dari satu individu kepada individu dan dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Apapun jangkauan difusi, dia selalu menawarkan alternatif pola hidup yang baru pada setiap masyarakat yang

dihampirinya (Kusumohamidjojo, 2017: 190).

Ngelegi merga dan *beru* muncul merupakan alternatif pola hidup yang baru. *Ngelegi merga* dan *beru* muncul karena interaksi orang-orang Karo dengan suku-suku lain atau komunitas-komunitas di luar dari dirinya. Interaksi tersebut mengharuskan mereka (orang Karo) memikirkan kembali cara dia berbudaya, berkomunitas dan berelasi. Hal ini disebabkan karena pentingnya *merga* dan *beru* dalam masyarakat Karo. Tanpa adanya *merga* dan *beru*, seseorang tetap dianggap sebagai subyek liyan.

Merga atau Beru dalam Masyarakat Karo

Suku Karo adalah suku asli yang mendiami Dataran Tinggi Karo, Sumatera Utara, Indonesia. Nama suku ini dijadikan salah satu nama kabupaten di salah satu wilayah yang mereka diami (dataran tinggi Karo) yaitu Kabupaten Karo. Suku ini memiliki bahasa sendiri yang disebut bahasa Karo (Marsiupahri, 2018). Orang Karo mendiami daerah yang meliputi dataran tinggi Karo, Langkat Hulu, Deli Hulu, Serdang Hulu dan sebagian dari Dairi (Koentjaraningrat, 1971: 97).

Suku Karo memiliki sistem kemasyarakatan yang dikenal dengan nama *merga silima*, *tutur si waluh*, dan *rakut sitelu*. Marga dalam bahasa Karo disebut *merga* untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan disebut *beru*. *Merga* atau *beru* ini disandang di belakang nama seseorang. *Merga* dalam masyarakat Karo terdiri dari lima kelompok, yang disebut dengan *merga si lima*, yang berarti marga yang lima. Kelima *merga* tersebut adalah: Karo-karo, Tarigan, Ginting, Sembiring, Perangin-angin (Marsiupahri, 2018; Steedly, 1993: 48).

Rakut si telu tersebut adalah *sangkep nggeluh* (kelengkapan hidup) bagi Orang Karo. Kelengkapan yang dimaksud adalah lembaga sosial yang terdapat

dalam Masyarakat Karo yang terdiri dari tiga kelompok, yaitu: *Kalimbubu*, *anak beru*, dan *senina*. *Kalimbubu* dapat didefinisikan sebagai keluarga pemberi istri, *anak beru* adalah keluarga yang mengambil atau menerima istri, dan *senina* keluarga atau satu galur keturunan *merga* atau keluarga inti (Rae, 1994: 10-12).

Tutur siwaluh adalah konsep kekerabatan masyarakat Karo, yang berhubungan dengan penuturan yaitu terdiri dari delapan golongan: *Puang kalimbubu*, *kalimbubu*, *senina*, *sembuyak*, *senina sipemerren*, *senina sepengalon/sedalanen*, *anak beru* dan *anak beru menteri*. *Puang kalimbubu* adalah *kalimbubu* dari *kalimbubu* seseorang. *Kalimbubu* adalah posisi atau penuturan yang paling tinggi dalam Orang Karo. Ia yang memberikan anak perempuannya bagi *anak beru*. Perkawinan yang paling direkomendasikan dalam Masyarakat Karo adalah perkawinan antara *anak beru* dan *kalimbubu* atau yang sering disebut dengan *impal* atau *pariban*. *Puang kalimbubu* adalah yang tertinggi dari yang tertinggi sebab ia adalah *kalimbubu* dari *kalimbubu* (Koentjaraningrat, 1971: 104). *Senina*, adalah mereka yang bersaudara karena mempunyai *merga* dan sub-*merga* yang sama. *Sembuyak*, secara harfiah *se* artinya satu dan *mbuyak* artinya kandungan, artinya orang-orang yang lahir dari kandungan atau rahim yang sama. Namun dalam masyarakat Karo istilah ini digunakan untuk *senina* yang berlainan sub-*merga* juga, dalam bahasa Karo disebut *si ndauh ipedeher* (yang jauh menjadi dekat). *Si pemerren* adalah orang yang ibu mereka bersaudara kandung. Bagian ini didukung lagi oleh pihak *si paribanen* yaitu orang-orang yang mempunyai isteri yang bersaudara. *Senina sepengalon* atau *sendalanen* yaitu orang yang bersaudara karena mempunyai anak-anak yang memperisteri dari *beru* yang sama. *Anak beru* berarti pihak yang mengambil isteri dari suatu keluarga tertentu untuk diperistri. *Anak*

beru dapat terjadi secara langsung karena mengawini wanita keluarga tertentu. *Anak beru menteri* yaitu *anak beru*-nya *anak beru*. Asal kata *menteri* adalah dari kata *minteri* yang berarti meluruskan. Jadi *anak beru minteri* mempunyai pengertian yang lebih luas sebagai petunjuk, mengawasi serta membantu tugas *kalimbubu*-nya dalam suatu kewajiban dalam upacara adat (Marsiupahri, 2018).

Fungsi *merga* dan *beru* secara signifikan terdapat dalam hubungan kekerabatan *merga si lima*, *rakut si telu*, *tutur si waluh*. Kelangsungan hidup orang Karo banyak dipengaruhi oleh *merga* dan *beru* yang tertuang dalam relasi *merga si lima*, *rakut si telu*, dan *tutur si waluh*. Mulai dari kelahiran sampai kematian, perkawinan sampai perceraian. Mulai dari menabur benih hingga masa panen tiba. Semuanya berkaitan dengan sistem kekerabatan tersebut. Relasi individu dengan komunitas Karo mampu memberikan jaminan rasa aman baik secara jasmani maupun rohani. Ketakutan terbesar Masyarakat Karo adalah ketika ia dianggap sebagai subjek *liyan* (orang asing) dalam komunitas. Hal tersebut menyangkut eksistensi dan keamanan serta kelangsungan kehidupannya. Penanda anggota komunitas adalah *merga* atau *beru*. Orang yang tidak memiliki *merga* atau *beru* adalah *outsider* meskipun sudah lama tinggal dalam komunitas. Jalan satu-satunya adalah memiliki *merga* atau *beru*. *Merga* dan *beru* adalah penanda relasi dan kerabat. Relasi ini menjamin keselamatan secara fisik dan sosial dalam komunitas Karo.

Signifikansi sistem kekerabatan memastikan setiap orang memiliki posisi, tempat, serta pengakuan dalam komunitas. *Marga* (klan) memegang peranan penting di dalamnya. Setiap individu mengetahui posisi (tempatnya dan levelnya) dalam adat ataupun pergaulan selalu berdasarkan *merga*. Namun demikian,

bagaimana jika di dalam komunitas ditemukan ada anggota yang bukan orang Karo? Di sinilah pentingnya tradisi *ngelegi merga* dan *beru*.

N. J. Sembiring dalam bukunya *Pedoman Tata Peradatan Perjabun Suku Karo di Perantauan* menerangkan demikian: Dalam perkembangannya Suku Karo mengalami proses interaksi dan perkembangan, penyebaran serta perluasan wilayah, sehingga perlu adanya perubahan dalam adat perkawinan dalam orang Karo (Sembiring, 2016: 1-2). Orang Karo tidak bisa menafikan keberadaan dirinya di antara suku-suku lain serta keberadaan suku-suku lain di tengah-tengah komunitasnya. Interaksi inilah yang mendorong munculnya difusi budaya. Difusi terjadi karena adanya interaksi orang Karo yang bersentuhan langsung dengan etnis lain.

Ide *ngelegi merga* dan *ngelegi beru* merupakan solusi yang sangat tepat bagi realitas keberadaan dan interaksi Suku Karo dengan suku lain. Adanya *merga* dan *beru* yang melekat pada seseorang, ia tidak dipandang lagi sebagai subjek *liyan* (orang asing), namun secara sah diterima menjadi anggota komunitas. Relasi dan level kedalaman kekerabatan mulai dapat dipraktikkan ketika *merga* atau *beru* menjadi identitas tambahan pada individu tersebut.

Budaya Ngelegi Merga dan Beru

Seperti yang disebutkan pada bagian sebelumnya, kemajuan zaman adalah salah satu faktor penyebaran dan interaksi Orang Karo dengan suku-suku dan bangsa lain. Perjumpaan Orang Karo dengan etnis lain tidak bisa dihindarkan (Sembiring, 2018: 1-2). Mempertahankan sebuah budaya dan cara hidup yang eksklusif di tengah realitas keragaman bukanlah solusi. Karena penyebaran Orang Karo semakin luas serta interaksinya dengan suku dan bangsa lain juga semakin beragam dan kompleks. Hal tersebutlah yang mendorong munculnya

difusi kebudayaan dalam cara berelasi. Difusi ini nampak dalam bentuk cara berbudaya yang masih berpegang pada ketetapan warisan budaya yang lama namun dalam wajah yang baru (Sembiring 2018).

Hal yang menarik juga ditemukan dalam analisis E. P. Ginting dalam bukunya *Religi Karo: Membaca religi Karo dengan mata yang baru*. Ginting mengatakan, memberi *merga* atau *beru* adalah sebuah tanda seseorang masuk ke dalam masyarakat Karo (Gintings, 1999: 155). Dasar *ngelegi marga* atau menjemput marga atau sering juga disebut dengan *penabalan marga* beranjak dari karakteristik Orang Karo yang sulit berinteraksi dengan orang yang berbeda dengan mereka. Orang yang berbeda dianggap sebagai subjek *liyan* (orang asing) (Jawak, 2014: 147). *Ngelegi marga* adalah pintu masuk ke dalam komunitas Karo bagi mereka yang non-Karo.

Wawancara yang dilakukan di Jakarta, hampir semua responden menegaskan, *merga* dan *beru* serta *ngelegi merga* adalah unsur paling vital dalam komunitas Karo. *Penabalan marga* atau tradisi *ngelegi merga* adalah fluiditas (kecairan) masyarakat Karo atas realitas keberagaman. Orang Karo terbuka menerima orang dari suku lain masuk ke dalam komunitasnya. Sembiring dalam tulisannya yang dimuat dalam tabloid *Sora Mido* yang berjudul *Ngelegi Marga ras Beru Guna Penangkuhen Jadi Kalak Karo* (2018) menerangkan: “Siapa pun tidak akan pernah mau dikeluarkan dari komunitas Karo jika pernah memiliki hubungan, terlebih karena ikatan perkawinan” (Sembiring, 2018: 3). Jika laki-laki yang datang maka akan diberikan marga kepadanya (ikatan *ngelegi merga*) dan jikalau perempuan yang datang maka *beru* (sebutan marga untuk perempuan) akan diberikan kepadanya (ikatan “*ngelegi beru*”) (Sembiring, 2018: 3).

Penahbisan *marga* tidak sama dengan adopsi, sebab orang tua yang melahirkan yang bersangkutan tetap diakui sebagai orang tua sah, namun orang tua (bapak-ibu) yang memberikan *marga* diperhitungkan sebagai orang tua adat. Seandainya seseorang sudah ditahbiskan menjadi Orang Karo maka sebuah amanah adat akan diberikan kepadanya dalam bentuk lambang-lambang yang diwakilkan oleh benda-benda khas *karo* misalnya, sarung, kain tenun *karo*, pisau, kain panjang dan lain-lain (Gintings, 1999: 155-157).

Ada dua jenis *ngelegi merga* dan *beru* diantaranya: pertama, orang dari Suku Batak yang lain yang meliputi Simalungun, Pak-pak, Angkola, Mandailing. Orang yang datang dari Suku Batak di luar Batak Karo maka pemberian *merga* atau *beru* yang diberikan kepadanya berdasarkan padanan “*marga*” yang juga dikenal pada batak yang lain. Karena menurut orang Karo, batak yang lain di luar Karo memiliki kedekatan dan padanan dengan *marga* yang ada pada *marga-marga karo* (Sembiring, 2018). Kedua, di luar komposisi batak (tidak termasuk pada salah satu rumpun batak). Biasanya ini terjadi karena perkawinan dengan suku di luar rumpun batak yang lain, namun bisa juga karena seseorang telah lama tinggal dan bergaul di dalam Komunitas Karo dan dengan suka rela meminta untuk terhisap ke dalam Komunitas Karo dan adat budayanya (Sembiring, 2018: 3).

Acara/ritual pemberian *merga* dan *beru* adalah peristiwa yang dianggap penting. Dalam peristiwa tersebut seseorang akan secara sah diberikan *sangkep nggeluh* atau keluarga baru (kelengkapan hidup) yang meliputi *merga*, posisi pada *rakut sitelu* dan *tutur siwaluh*. Secara otomatis ia akan masuk ke dalam keluarga yang memberikan *marga* kepadanya dan secara otomatis seluruh tanggung

jawab dan haknya sebagai Orang Karo mulai berlaku pada hari itu.

Pemberian *merga* dan *beru* tidak menyangkut warisan dari keluarga yang memberikan *marga* dan *beru*. *Ngelegi merga* atau *beru* hanya menyangkut sikap hidup untuk saling mengasihi dan rasa tanggung jawab dalam Komunitas Karo (Gintings, 1999:). Pemberian *marga* dan *beru* meliputi bagaimana seseorang berlaku, berelasi dan diperlakukan dalam sebuah komunitas yang ia datangi (Jawak, 2014). Hal ini meliputi bagaimana cara ia bertutur, bersikap dan berkomunikasi dalam kultur yang baru. Meskipun tidak berasal dari orang tua dan nenek moyang sama, *merga* sebagai pengikat solidaritas (Ihromi, 2006: 159; Koentjaraningrat, 1971: 108).

Dengan demikian klaim manusia sebagai makhluk relasional benar adanya. *Ngelegi merga* adalah cara berelasi dengan komunitas Karo. *Ngelegi merga* adalah upaya kultur untuk mengikis kecurigaan pada orang yang non-Karo. *Ngelegi merga* memastikan tidak ada subjek *liyan* namun semua adalah anggota komunitas. Dengan demikian sebenarnya dapat dimengerti tindakan *ngelegi* (menjemput) *merga* dan *beru* merupakan bentuk ikatan antarindividu dalam masyarakat Karo. *Ngelegi merga* atau *beru* adalah cara masyarakat Karo melihat semua orang dalam komunitasnya sebagai subjek bukan liyan.

Problema Identitas: Integrasi atau Multikultur

Budaya menjemput “marga” memiliki kearifan sebagai sebuah pengakuan dan penerimaan dalam komunitas. Namun demikian, muncul masalah baru yaitu masalah identitas. Apakah demi sebuah identitas baru, identitas yang lama terkubur? Dari sudut filsafat kebudayaan, tindakan menjemput *marga* dan *beru* sebenarnya sebuah integrasi sosial.

Romo Frans Magnis Suseno dalam bukunya yang berjudul *Moralitas*

dan nilai-nilai komunitas dalam bukunya *Pijar-pijar Filsafat* tampaknya mampu menolong kita memahami problema integrasi dan multikultur. Suseno memakai istilah *komunitarisme* untuk merujuk pada ide integrasi, sementara untuk merujuk pada ide multikultur ia memakai istilah *liberalisme* (Magnis-Suseno, 2005: 199). Suseno menguraikan pendapat beberapa tokoh yang mendukung ide *komunitarisme* di antaranya: Michael Sandel dan Alasdair MacIntyre. Michael sandel menguraikan pendapatnya dengan menyerang kelompok *liberalisme* dengan mengatakan bahwa tidak mungkin ada subjek tanpa konteks, dan tidak mungkin ada moralitas tanpa konteks sosial (Magnis-Suseno, 2005: 201). Sandel, seperti yang dituliskan oleh Suseno mengatakan bahwa, subjek selalu *situated*, tertanam dalam sebuah masyarakat tertentu dengan nilai, keyakinan dan harapan tertentu. Apabila subjek selalu berada dalam *situated* dalam sebuah masyarakat dengan nilai-nilai tertentu, subjek tidak menentukan tujuan hidupnya secara individual, melainkan bersama-sama dengan anggota-anggota kelompok lainnya. Untuk menemukan diri, orang memerlukan dukungan lingkungan yang utuh, ia harus mengorientasikan diri pada nilai-nilai yang dimiliki bersama (Magnis-Suseno, 2005: 204). Apa yang diungkapkan oleh Sandel sangat merujuk pada peleburan nilai-nilai yang terkandung pada komunitas, yaitu integrasi sosial.

Filsuf yang lain yang diuraikan oleh Suseno adalah Alasdair MacIntyre yang juga menyerang ide *liberalis*. MacIntyre mengatakan, usaha liberalisme untuk merumuskan prinsip-prinsip keadilan dan kebaikan dasar yang netral, yang tidak tergantung pada pandangan-pandangan tertentu tentang apa yang baik dan buruk, salah arahnya. Tidak ada moralitas yang bebas dari tradisi tertentu (Magnis-Suseno, 2005: 204). MacIntyre

menolong kita memahami bahwa setiap individu sadar atau tidak sadar selalu terhubung dengan sebuah tradisi yang mendahuluinya. Sehingga ide kebebasan individu sepertinya tidak terlalu tepat menjadi wacana.

Pendapat Sandel dan MacIntyre yang dipakai Suseno untuk merujuk ide integrasi menegaskan keberadaan manusia tidak mungkin terlepas dari sebuah konteks. Konteks terkait dengan komunitas yang memiliki nilai-nilai bersama. Sehingga untuk menemukan diri perlu memperhatikan tradisi yang tertanam dalam konteks tertentu.

Jhon Rawls adalah filsuf yang memperjuangkan ide liberalis seperti yang diuraikan oleh Suseno. Rawls menegaskan bahwa pahamnya tentang subjek adalah moral: Subjek yang diandaikannya, yang di bawah *veil of ignorance* akan menyepakati dua prinsip keadilan dan kebaikan, mampu: (1) untuk mempunyai pandangan tentang yang baik, misalnya tentang rencana kehidupan, dan (2) sudah mempunyai kesadaran keadilan. Jadi dua prinsip *fairness* itu tidak menciptakan keadilan, melainkan berdasarkan kesadaran atas keadilan dan *fairness* individu menyepakati dua prinsip itu (Magnis-Suseno, 2005: 208). Rawls juga menegaskan bahwa sebagai subjek hak dan persona semua individu mesti sama, maka sikap dan pandangan berbeda tentang apa yang baik dan buruk tidak boleh menjadi dasar untuk membedakan di antara mereka. Rawls juga membedakan antara moralitas pribadi: pandangan tentang yang baik dan yang buruk serta keutamaan-keutamaan yang dijunjung tinggi, yaitu tatanan masyarakat yang sesuai dengan harkat kemanusiaan para warga masyarakat. Kriteria untuk yang pertama adalah kemampuan subjek untuk mengidentifikasi diri dengan nilai dan keutamaan itu. Kriteria yang kedua adalah semua dapat menyetujuinya (Magnis-Suseno, 2005: 208).

Pemahaman Rawls menjadi titik pijak kritik *liberalisme* terhadap *komunitarisme*, bahwa masyarakat modern hanya dapat dibangun atas dasar keadilan prosedural dan jaminan hak-hak semua anggota. Akan tetapi, apakah dasar itu cukup kuat untuk memungkinkan kehidupan bersama yang positif? Apakah pengakuan keutuhan semua anggota masyarakat sudah mencukupi sebagai motivasi untuk secara positif membangun kehidupan bersama? (Magnis-Suseno, 2005: 213).

Paham *liberalisme* mengutamakan nilai-nilai moral pribadi dan memberi ruang kebebasan untuk menentukan nilai-nilai individu tanpa bergantung pada konteks yaitu nilai-nilai komunitas. Liberalisme juga menegaskan apakah keutuhan sebuah komunitas dapat dijadikan sebagai motivasi yang cukup positif untuk membangun sebuah kehidupan bersama.

Kelebihan dan kekurangan konsep Integrasi dan multikultur sebagai model berbudaya

Pada bagian ini penulis akan memaparkan beberapa yang menjadi kekuatan dan kelemahan model ini.

Integrasi

Integrasi berasal dari kata sifat *integer* (Inggris), yang berarti “utuh,” “tidak bercacat,” “tidak retak,” “bulat dan padu.” Pengertian ini mencita-citakan sebuah keutuhan, kesatuan dan keseragaman. Keragaman diikat menjadi keseragaman dengan tujuan memudahkan relasi, komunikasi dan pengaturan. Perbedaan dipahami sebagai titik buntu yang menjadikan seorang individu menjadi subjek *liyan* karena tidak sama dengan keseluruhan anggota komunitas. Faktor bahasa dan budaya yang berbeda adalah alasan utama untuk berintegrasi melebur dalam sebuah identitas yang disepakati atau dengan sukarela diintegrasikan di dalamnya. Habermas mengatakan bahwa selama manusia dapat ber-

komunikasi dengan bahasa, rasionalitas tidak dapat sama sekali ditindas (Magnis-Suseno, 2005: 168). Ikatan solidaritas sosial semakin menguat ketika berada dalam sebuah identitas yang sama. Perbedaan identitas terkadang mempersempit ruang solidaritas pada individu sehingga ide integrasi memberi ruang solidaritas yang lebih kuat dibandingkan ide multikultur.

Namun yang menjadi titik lemah integrasi adalah nilai-nilai individu menghilang karena yang muncul ke permukaan adalah nilai-nilai komunitas. Kebebasan berekspresi secara individu dikekang dan selalu dilihat dari lensa komunitas. Dari segi kearifan lokal, orang yang melebur dalam budaya (identitas) baru bisa saja melupakan identitasnya yang lama jikalau ia tetap tinggal dan hidup di tengah komunitas dengan identitas yang baru itu.

Multikultur

Multikultur berasal dari dua kata yaitu *multi* dan *cultur* yang sudah mengalami alih bahasa ke bahasa Indonesia. *Multi* berarti banyak (lebih dari satu), sedangkan *cultur* berarti budaya (kebiasaan). Dengan kata lain multikultur mengajukan sebuah ide pengakuan akan keragaman serta kebebasan individu berekspresi sesuai dengan kulture masing-masing. Multikultur sangat menghargai kebebasan individu dan memberi ruang menunjukkan identitas masing-masing sesuai dengan identitas awal tanpa harus menjemput identitas yang baru.

Dalam ruang yang lebih luas, ide multikultur menjamin pemeliharaan keberlangsungan masing-masing identitas karena memiliki kedudukan dan penghargaan yang sama di tengah-tengah komunitas. Nilai-nilai *fairness* lebih terlihat. Hal ini juga memungkinkan mengurangi adanya intervensi dari pihak luar apalagi negara dan pemerintah.

Namun nilai kebebasan pada multikultur juga menemui titik-titik lemah.

Karena masing-masing bergerak dalam identitasnya masing-masing menyebabkan tidak ada ikatan yang lebih kuat yang menyatukan individu dalam komunitas. Muhammad Ali dalam bukunya *Teologi Pluralis: Menghargai kemajemukan menjalin kebersamaan* mengatakan model multikultur dan pluralism juga memiliki dilema. Pertama, dilemma antara hak-hak individu dan kolektif (Ali, 2003: 46). Dalam konteks multikultur yang lebih dominan adalah hak-hak individu sementara individu tidak mungkin pernah lepas dari komunitas. Hal ini akan memperkecil rasa solidaritas. Kedua, ide multikultur yang memberi ruang kebebasan bagi budaya minoritas dapat memperkuat diskriminasi dasar sistem sosial (Ali, 2003: 46). Fundamentalisme budaya sering muncul dalam situasi yang demikian. Namun demikian, di atas semua dilema-dilema di atas pluralisme budaya mensyaratkan adanya landasan nilai-nilai bersama seperti keadilan dan persamaan, terlepas dari rincian-rincian doktrin dan tradisi-tradisi dan keyakinan-keyakinan yang ada.

KESIMPULAN

Perjumpaan antarbudaya sangat problematis ketika memiliki implikasi horizontal. Hal ini terjadi karena kebudayaan seseorang bahkan kelompok sering bergesekan dengan kebudayaan orang lain atau kelompok lain. Bagaimana kita memandang *ngelegi merga* dan *beru* dalam wajah budaya? Tidakkah *ngelegi merga* dan *beru* merupakan sebuah pengabaian akan eksistensi seseorang dalam identitas dalam nilai-nilai kulturalnya?

Ngelegi merga dan *beru* merupakan sebuah tindakan integrasi ke dalam komunitas Karo demi sebuah pengakuan dan pencegahan terjadinya kecurigaan dan terbentuknya subjek *liyan*. Namun, tindakan ini sebenarnya memiliki ruang positif yaitu tindakan solidaritas dan kesetiakawanan sosial. Dalam hal ini penu-

lis, tidak berpijak pada apakah memeningkan nilai-nilai integrasi yang menekankan keserupaan dan mengabaikan wajah budaya yang multikultur. Namun, lebih pada bagaimana tindakan *ngelegi merga* dan *beru* dapat merangkul setiap individu dalam komunitas Karo tanpa menjadi subjek *liyan*. Budaya *ngelegi merga* dan *beru* memberi celah hidup bersama sebagai keluarga dengan segala perbedaan.

Spirit keterbukaan mendominasi jiwa tradisi *ngelegi merga* dan *beru*. Siapa saja dapat diterima menjadi keluarga dan bagian dari komunitas tanpa memperhitungkan satu ayah dan ibu atau satu nenek moyang yang sama. *Ngelegi merga* dan *beru* sekalipun terkesan sangat integratif namun merupakan kearifan lokal masyarakat Karo dalam menjadikan liyan sebagai keluarga, menjadikan orang asing sebagai anggota komunitas. *Ngelegi merga* atau *beru* adalah jembatan bagi orang lain untuk terhubung dengan Komunitas Karo dan cara Orang Karo terhubung dengan orang lain. Tidak adalagi subjek *liyan*, namun sebagai keluarga. Perlu diingat *ngelegi merga* dan *beru* tidaklah mencabut seseorang dari identitasnya secara total, namun tetap memberikan ruang untuk menjalankan eksistensinya sebagai individu yang memegang nilai-nilai tertentu. Namun, dalam konteks komunitas dan adat Karo perlu adanya *merga* dan *beru* agar mendapat peneguhan identitas. *Merga* atau *beru* adalah cara anggota komunitas untuk menunjukkan cinta kasih dan solidaritasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2003). *Teologi pluralis-multikultural: menghargai kemajemukan menjalin kebersamaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Barus, M. F. H. (2018). Adat istiadat Suku Karo (blog). 2018. [https://](https://marsiuspahri.blogspot.com/p/blog-page.html)
- marsiuspahri.blogspot.com/p/blog-page.html.
- Brahmana, P. (2003). Daliken Si Telu dan solusi masalah sosial pada masyarakat Karo: kajian sistem pengendalian sosial. *Digital USU Library*, 1–106.
- Gintings, E. P. (1999). Religi Karo: membaca religi Karo dengan mata yang baru. Kabanjahe: Abdi Karya.
- Ihromi, T. O, (ed). (2006). Pokok-pokok antropologi budaya. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jawak, K. (2014). Teologi agama-agama gereja Batak Karo Protestan (GBKP).” Salatiga: Universitas Kristen Satia Wacana (UKSW).
- Koentjaraningrat, (ed). (1971). Manusia dan kebudayaan Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Kusumohamidjojo, B. (2017). Filsafat kebudayaan: proses realisasi manusia (revisi). Bandung: Penerbit Yrama Widya.
- Magnis-Suseno, F. (2005). Pijar-pijar filsafat: dari Gatholoco ke filsafat perempuan, dari Adam Müller ke postmodernisme. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Nataatmadja, H. (1984). Dialog, manusia, falsafah, budaya dan pembangunan. Surabaya: Yayasan Pusat Pengkajian Latihan, dan Pengembangan Masyarakat.
- Peursen, C. A. van. 1976. Strategi kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius.
- Rae, S. (1994). Breath becomes the wind: old and new in Karo religion. New Zealand: University of Otago Press.
- Riyanto, A. (2018). Relasionalitas, filsafat fondasi interpretasi: aku, teks, liyan, fenomen. Yogyakarta: Kanisius.
- Sembiring, N. J. (2016). Buku pedoman tata peradatan Perjabun Suku Karo di perantauan. Jakarta: Pustaka Sora Mido.

- Sembiring, N. J. (2018). Ngelegi marga ras Beru guna penangkuhen jadi Kalak Karo. *Tabloid SORA MIDO*, 2018.
- Sembiring, N. J. (2019). Ngelegi merga dan Beru.
- Sihotang, Kasdin. 2009. Filsafat manusia: upaya membangkitkan humanisme. Yogyakarta: Kanisius.
- Simanjuntak, F. (2017). Analisis fungsi musik dalam *guro-guro aron* pada upacara rebu-rebu masyarakat Karo di Desa Gunung Meriah, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Deli Serdang. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Steedly, Mary Margaret. (1993). *Hanging without a rope: narrative experience in colonial and postcolonial Karoland*. USA: Princeton Legacy Library.
- Tilaar, H. A. R. (1999). Pendidikan, kebudayaan, dan masyarakat madani Indonesia. cet. 1. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Uhi, J. A. (2017). Filsafat kebudayaan: konstruksi pemikiran Cornelis Anthonie van Peursen dan catatan reflektifnya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.